

PENGURANGAN RISIKO BENCANA DI INDONESIA

Lilik Kurniawan

*Direktur Pengurangan Risiko Bencana
Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia*

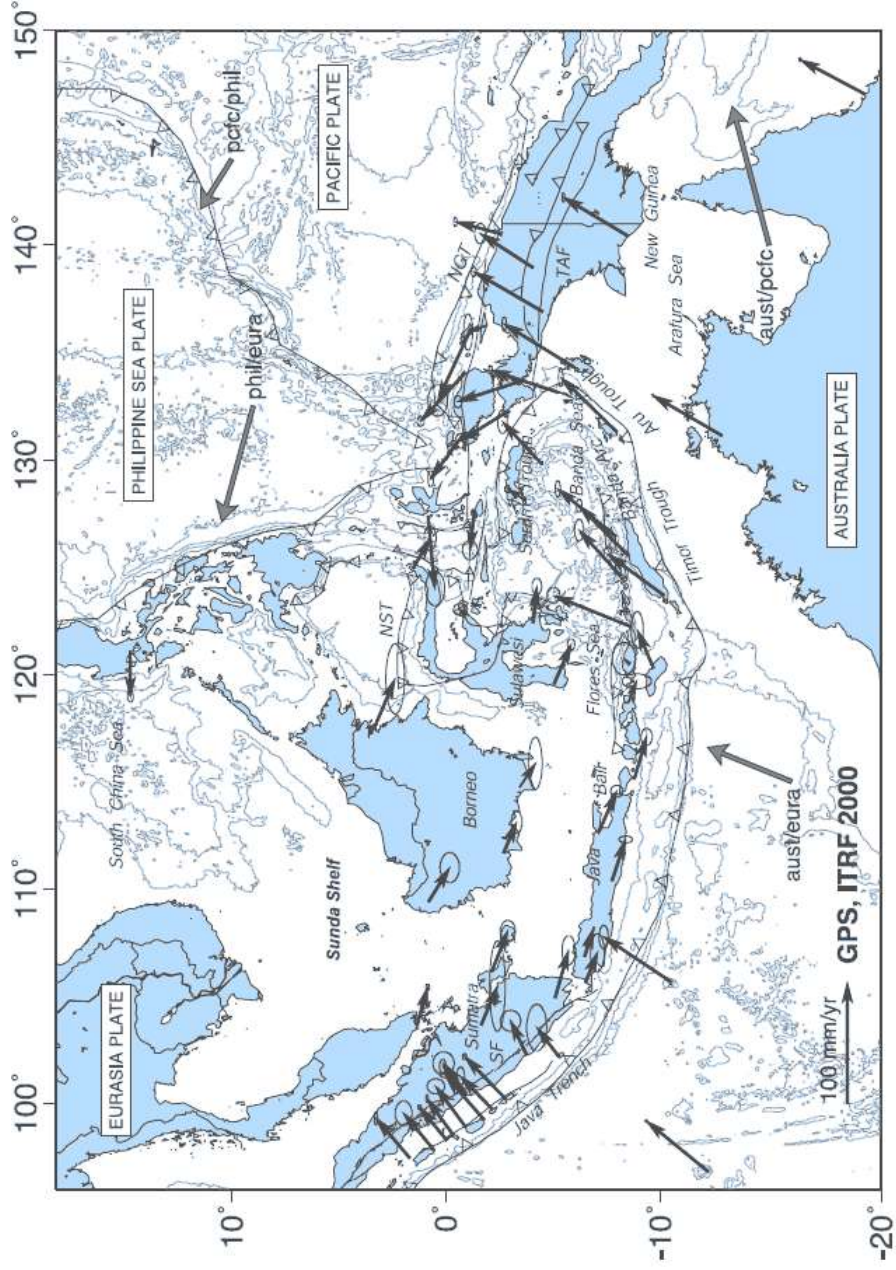


BNP B



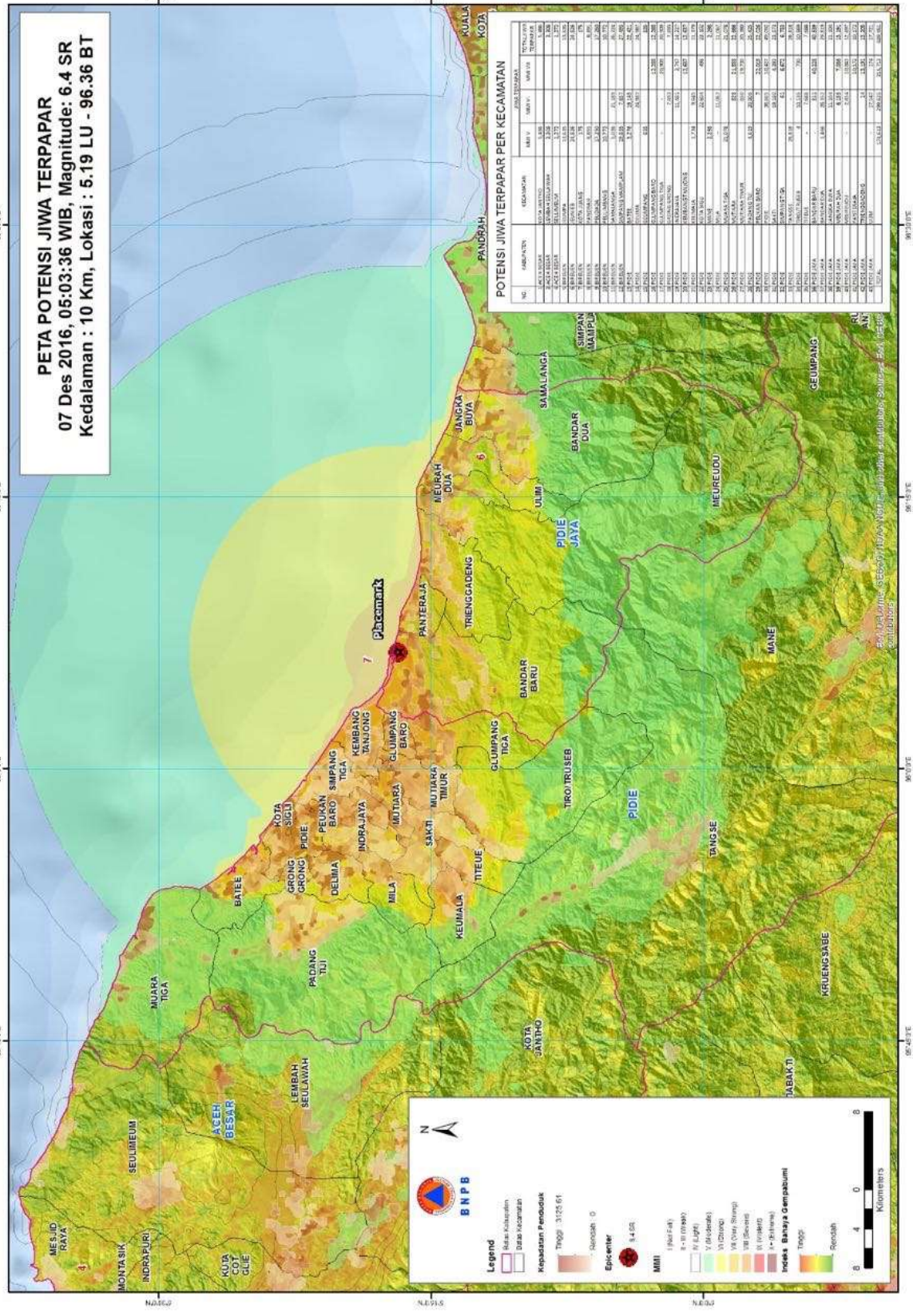
**IKATAN AHLI
KEBENCANAAN
INDONESIA**

KULIAH UMUM ITS
SURABAYA, 8 DESEMBER 2016



- Secara geografis Indonesia terletak pada rangkaian cincin api yang membentang sepanjang lempeng pasifik yang merupakan lempeng tektonik paling aktif di dunia.
- Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai busur gunungapi sepanjang di dunia. Indonesia memiliki 127 gunungapi aktif, atau sekitar 13% gunungapi aktif di dunia terletak di Indonesia.
- Wilayah Indonesia sangat berisiko terjadi bencana hidrometeorologi (80%)
- Identifikasi risiko sebagai rujukan inarisk.bnnpb.go.id

GEMPABUMI PIDIE JAYA : Kemungkinan sesar Samalanga - Sipopok ?



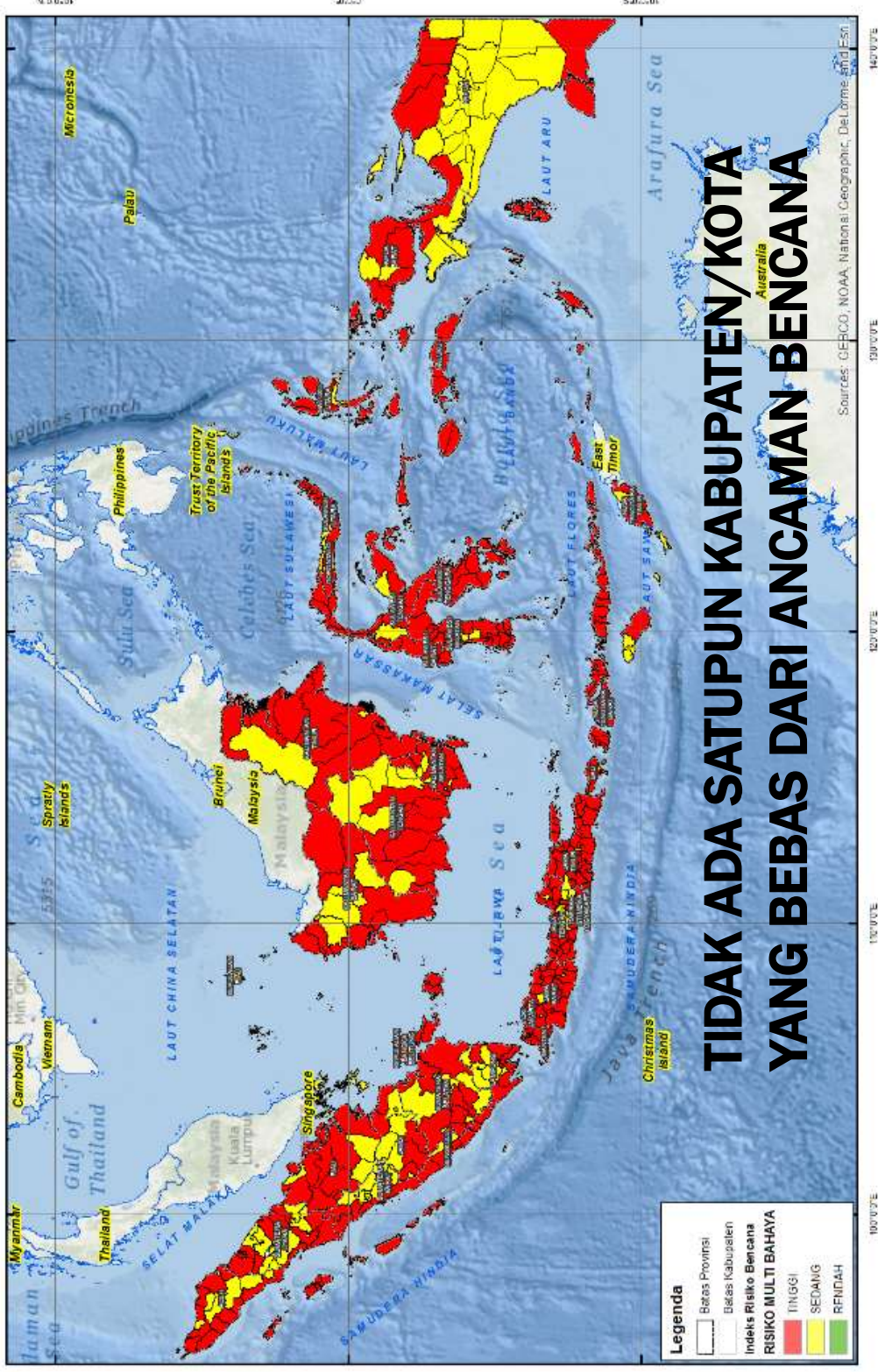


Tahun 2014, BNPB meluncurkan IRBI 2013 yang merupakan potret risiko bencana di daerah

IRBI 2013 ini berkontribusi dalam penyusunan RPJNM 2015-2019 bidang penanggulangan bencana

PETA INDEKS RISIKO BENCANA INDONESIA

Update : Tahun 2013



TIDAK ADA SATUPUN KABUPATEN/KOTA YANG BEBAS DARI ANCAMAN BENCANA



Gempabumi dan Tsunami Aceh dan Sumut 26 Desember 2004

Peran Perguruan Tinggi/Akademisi ? ITS ?

- **Sendai Framework for Disaster Risk Reduction**

- **RPJMN 2015-2019**

- **Teori SPARE**

- **Proposal Baru PRB**

- **Jakstra PB 2015-2019**

TARGET

1. *Pengurangan yang berarti dalam angka kematian akibat bencana di dunia*
2. *Pengurangan yang berarti dalam jumlah masyarakat terdampak*
3. *Pengurangan kerugian ekonomi dalam kaitannya dengan GDP dunia*
4. *Pengurangan yang berarti dalam kerusakan terhadap infrastruktur penting/kritis dan gangguan pelayanan dasar, termasuk kesehatan dan fasilitas pendidikan*
5. *Penambahan jumlah Negara yang memiliki strategi PRB di tingkat nasional dan tingkat daerah pada tahun 2020*
6. *Peningkatan kerjasama Internasional*
7. *Bertambahnya akses pada system peringatan dini multi bencana dan informasi risiko bencana dan pengkajian*

PRIORITAS

1. *Pemahaman Risiko Bencana*
2. *Penguatan pengaturan risiko bencana untuk mengelola risiko bencana*
3. *Investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan*
4. *Peningkatan kesiapsiagaan bencana untuk response yang lebih baik, dan untuk "pembangunan kembali yang lebih baik" dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi*

- Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
- **RPJMN 2015-2019**
- Teori SPARE
- Proposal Baru PRB
- Jakstra PB 2015-2019



PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA

NAWA CITA Nomor 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

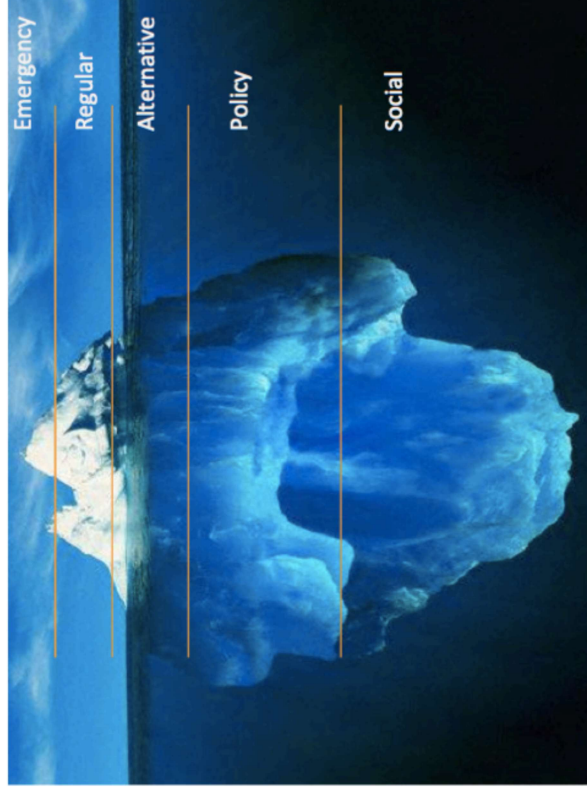
SASARAN

Menurunnya **indeks risiko bencana** pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.

STRATEGI

- 1 Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah,
- 2 Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana,
- 3 Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana,

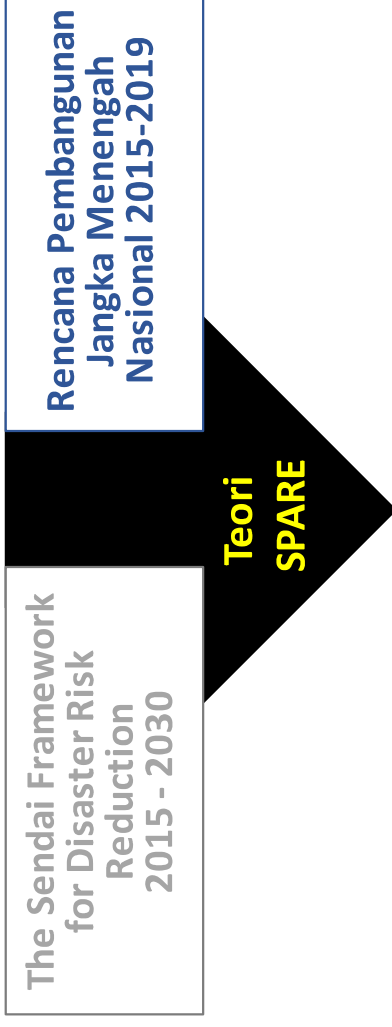
- Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
- RPJMN 2015-2019
- **Teori SPARE**
- Proposal Baru PRB
- Jakstra PB 2015-2019



SPARE dalam fenomena gunung es [Maarif, 2012]

- E** faktor yang memperparah kejadian bencana (masalah kapasitas)
- R** faktor pemicu terjadinya bencana
- A** geologi yang dinamis, perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi, degradasi lingkungan yang semakin meningkat dan permasalahan antropogenik
- P** politik ekonomi, ekologi, anggaran dan regulasi.
- S** kemiskinan, urbanisasi, pendidikan, peringatan dan kependudukan

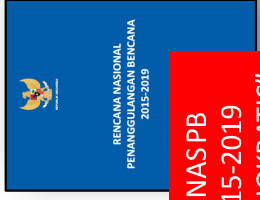
- Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
- RPJMN 2015-2019
- Teori SPARE
- **Proposal Baru PRB**
- Jakstra PB 2015-2019



“New Proposal” PRB di Indonesia

- **Kurangi Risiko Bencana saat ini**
 - Kurangi H, Kurangi V, **Tingkatkan C**
- **Cegah terjadinya Risiko Bencana Baru**
 - Geologi, Perubahan iklim, Pembangunan, Pertambahan jumlah penduduk
- **Penguatan Ketangguhan Ekonomi dan Sosial**
- **Indonesia DRR Knowledge Center**

- Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
- RPJMN 2015-2019
- Teori SPARE
- Proposal Baru PRB
- **Jakstra PB 2015-2019**



**RENASPB
2015-2019
"TEKNOKRATIS"**



Catatan :

Renas PB Teknokratik dan Rekomendasi IABI digunakan untuk mendorong rencana pembangunan (RPJMN) memasukkan penanggulangan bencana

Situasi saat itu :

2 kandidat Capres dan Cawapres TIDAK ADA yang bicara penanggulangan bencana pada visi dan misinya

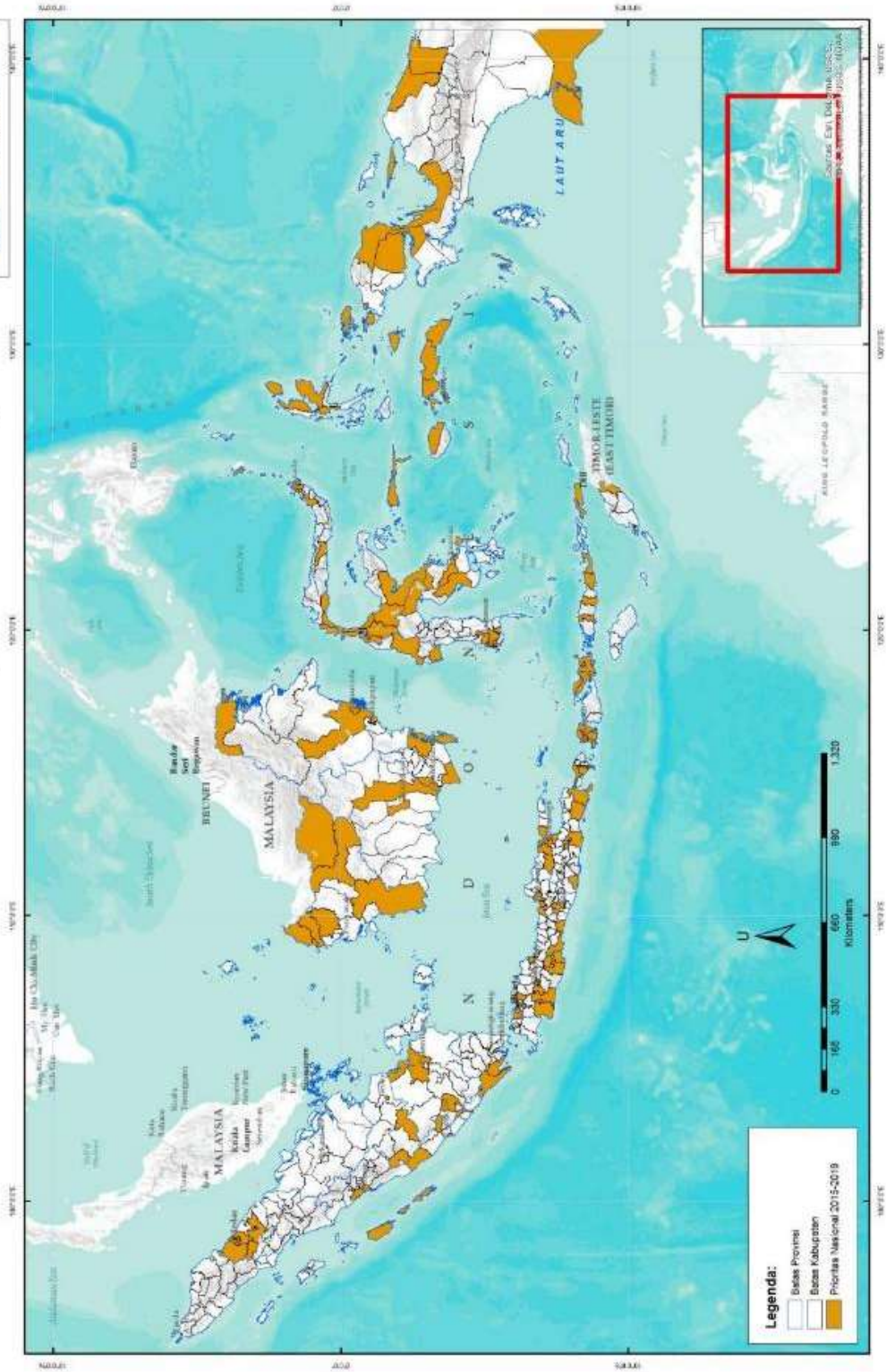
BNPB dengan mandat sebagai **Koordinator** untuk Penanggulangan Bencana membuat **Kebijakan penurunan Indeks Risiko Bencana** sampai dengan tahun 2019 sebesar 30%.

Berdasarkan Kebijakan tersebut :

konsep menurunkan Indeks Risiko Bencana dengan cara **Meningkatkan Kapasitas Penanggulangan Bencana di tingkat Kab/Kota.**

71 Indikator yang digunakan didasarkan pada Sistem PB dan **Manajemen Risiko Bencana**

PETA WILAYAH PRIORITAS NASIONAL 2015-2019 (RPJMN 2015-2019)



LOKASI SASARAN PRIORITAS

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota Prioritas	Indeks Risiko	Tingkat Risiko	Struktur Ruang
1	PAPUA	Jayapura	203.2	TINGGI	PKN
2	PAPUA	Merauke	170	TINGGI	PKW; Kawasan MIFEE Merauke
3	PAPUA	Sarmi	171.6	TINGGI	PKW
4	PAPUA	Kepulauan Yapen	117.2	SEDANG	Pusat Pertumbuhan Lainnya
5	PAPUA BARAT	Kota Sorong	183.2	TINGGI	PKN
6	PAPUA BARAT	Manokwari	204.8	TINGGI	PKW
7	PAPUA BARAT	Nabire	180.8	TINGGI	PKW, Pusat Pertumbuhan Lainnya
8	PAPUA BARAT	Raja Ampat	200.8	TINGGI	Kawasan Pariwisata
9	PAPUA BARAT	Teluk Wondama	147.2	TINGGI	Pusat Pertumbuhan Lainnya
10	PAPUA BARAT	Teluk Bintuni	166.8	TINGGI	Kawasan Industri (KI)
11	MALUKU	Kota Ambon	156.4	TINGGI	PKN
12	MALUKU	Seram Bagian Barat	180.4	TINGGI	PKW, Pusat Pertumbuhan Lainnya
13	MALUKU	Seram Bagian Timur	173.2	TINGGI	PKW, Pusat Pertumbuhan Lainnya
14	MALUKU	Maluku Tengah	214	TINGGI	PKW, Pusat Pertumbuhan Lainnya
15	MALUKU	Maluku Tenggara	179.2	TINGGI	PKW
16	MALUKU	Buru	179.6	TINGGI	PKW
17	MALUKU UTARA	Kota Ternate	160.4	TINGGI	PKN
18	MALUKU UTARA	Pulau Morotai	166.4	TINGGI	KEK Morotai, PKSN Morotai, KSPN
19	MALUKU UTARA	Halmahera Utara	194.8	TINGGI	PKW
20	MALUKU UTARA	Kota Tidore Kepulauan	164.4	TINGGI	PKW
21	MALUKU UTARA	Kepulauan Sula	219.2	TINGGI	PKW
22	MALUKU UTARA	Halmahera Timur	173.2	TINGGI	KI Buli-Halmahera Timur
23	NUSA TENGGARA BARAT	Kota Mataram	149.2	TINGGI	PKN

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota Prioritas	Indeks Risiko	Tingkat Risiko	Struktur Ruang
24	NUSA TENGGARA BARAT	Lombok Barat	205.2	TINGGI	Usulan KSPN Mataram Raya
25	NUSA TENGGARA BARAT	Lombok Timur	180.4	TINGGI	Usulan KSPN Mataram Raya
26	NUSA TENGGARA BARAT	Lombok Tengah	168.4	TINGGI	PKW, KEK Mandalika
27	NUSA TENGGARA BARAT	Lombok Utara	152.4	TINGGI	Usulan KSPN Mataram Raya
28	NUSA TENGGARA BARAT	Kota Bima	170.8	TINGGI	Pusat Pertumbuhan Lainnya
29	NUSA TENGGARA BARAT	Dompu	184.4	TINGGI	Pusat Pertumbuhan Lainnya
30	NUSA TENGGARA BARAT	Bima	209.2	TINGGI	Pusat Pertumbuhan Lainnya
31	NUSA TENGGARA TIMUR	Kota Kupang	138	SEDANG	PKN
32	NUSA TENGGARA TIMUR	Ngada	158.8	TINGGI	Pusat Pertumbuhan Lainnya
33	NUSA TENGGARA TIMUR	Ende	186	TINGGI	PKW
34	NUSA TENGGARA TIMUR	Sikka	200.8	TINGGI	PKW
35	NUSA TENGGARA TIMUR	Manggarai	174.8	TINGGI	PKW
36	NUSA TENGGARA TIMUR	Alor	183.2	TINGGI	PKSN
37	NUSA TENGGARA TIMUR	Belu	181.2	TINGGI	PKSN
38	GORONTALO	Gorontalo	146.4	TINGGI	PKN; KPB Pawonsari
39	GORONTALO	Kota Gorontalo	123.2	SEDANG	PKN
40	SULAWESI BARAT	Mamuju	200.4	TINGGI	PKW
41	SULAWESI BARAT	Polewali Mandar	202	TINGGI	PKW
42	SULAWESI SELATAN	Maros	168.4	TINGGI	KSN Perkotaan Maminasata
43	SULAWESI SELATAN	Takalar	144.4	TINGGI	KSN Perkotaan Maminasata
44	SULAWESI SELATAN	Gowa	163.2	TINGGI	KSN Perkotaan Maminasata
45	SULAWESI SELATAN	Luwu Timur	202	TINGGI	KPB Kolonedale
46	SULAWESI SELATAN	Kota Makasar	144.4	TINGGI	PKN, KSN Perkotaan Maminasata
47	SULAWESI SELATAN	Bantaeng	174.4	TINGGI	KI Bantaeng
48	SULAWESI TENGAH	Sigi	72	SEDANG	Pusat Pertumbuhan Lainnya

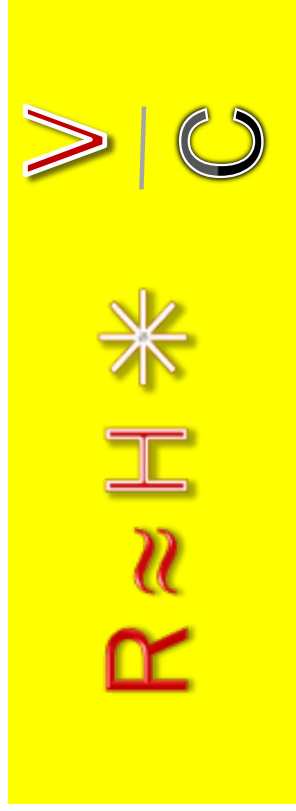
No	Provinsi	Kabupaten/ Kota Prioritas	Indeks Risiko	Tingkat Risiko	Struktur Ruang
49	SULAWESI TENGAH	Donggala	189.2	TINGGI	Pusat Pertumbuhan Lainnya
50	SULAWESI TENGAH	Kab. Poso	172.4	TINGGI	KPB Tamporele
51	SULAWESI TENGAH	Parigi Moutong	173.6	TINGGI	Pusat Pertumbuhan Lainnya
52	SULAWESI TENGAH	Morowali	177.2	TINGGI	KPB Kolonedale
53	SULAWESI TENGAH	Kota Palu	181.2	TINGGI	PKN
54	SULAWESI TENGGARA	Kolaka	186.4	TINGGI	Pusat Pertumbuhan Lainnya
55	SULAWESI TENGGARA	Konawe	173.6	TINGGI	Pusat Pertumbuhan Lainnya
56	SULAWESI TENGGARA	Kota Kendari	148.4	TINGGI	PKN, Pusat Pertumbuhan Lainnya
57	SULAWESI UTARA	Kota Bitung	163.2	TINGGI	Pusat Pertumbuhan Lainnya
58	SULAWESI UTARA	Minahasa Utara	158.4	TINGGI	KSN (Usulan) Perkotaan Manado Raya
59	SULAWESI UTARA	Minahasa Selatan	173.6	TINGGI	KSN (Usulan) Perkotaan Manado Raya
60	SULAWESI UTARA	Kepulauan Sangihe	154.4	TINGGI	PKSN Sangihe
61	SULAWESI UTARA	Kota Manado	130.4	SEDANG	Pusat Pertumbuhan Lainnya
62	KALIMANTAN BARAT	Kota Pontianak	96.4	SEDANG	PKN
63	KALIMANTAN BARAT	Kota Singkawang	178	TINGGI	Pusat Pertumbuhan Lainnya
64	KALIMANTAN BARAT	Bengkayang	178	TINGGI	Pusat Pertumbuhan Lainnya
65	KALIMANTAN BARAT	Sambas	180.4	TINGGI	Pusat Pertumbuhan Lainnya
66	KALIMANTAN BARAT	Sintang	156.4	TINGGI	Pusat Pertumbuhan Lainnya
67	KALIMANTAN BARAT	Kapuas Hulu	163.2	TINGGI	Pusat Pertumbuhan Lainnya
68	KALIMANTAN BARAT	Ketapang	192.4	TINGGI	KI Ketapang
69	KALIMANTAN BARAT	Landak	131.6	SEDANG	KI Landak
70	KALIMANTAN SELATAN	Kotabaru	205.2	TINGGI	Pusat Pertumbuhan Lainnya
71	KALIMANTAN SELATAN	Barito Kuala	190	TINGGI	KSN Banjarbakula
72	KALIMANTAN SELATAN	Tanah Laut	178	TINGGI	KSN Banjarbakula

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota Prioritas	Indeks Risiko	Tingkat Risiko	Struktur Ruang
73	KALIMANTAN TENGAH	Kota Palangkaraya	148.4	TINGGI	PKN, Pusat Pertumbuhan Lainnya
74	KALIMANTAN TENGAH	Kapuas	179.2	TINGGI	Pusat Pertumbuhan Lainnya
75	KALIMANTAN TIMUR	Kota Samarinda	134.8	SEDANG	PKN, Pusat Pertumbuhan Lainnya
76	KALIMANTAN TIMUR	Kota Balikpapan	159.2	TINGGI	PKN, Pusat Pertumbuhan Lainnya
77	KALIMANTAN TIMUR	Kutai Kertanegara	160.4	TINGGI	Pusat Pertumbuhan Lainnya
78	KALIMANTAN UTARA	Kota Tarakan	132.4	SEDANG	PKN
79	KALIMANTAN UTARA	Nunukan	173.2	TINGGI	PKSN Perbatasan
80	BALI	Kota Denpasar	167.2	TINGGI	Kawasan Perkotaan Sarbagita
81	BALI	Badung	179.2	TINGGI	Kawasan Perkotaan Sarbagita
82	BALI	Tabanan	174.4	TINGGI	Kawasan Perkotaan Sarbagita
83	BALI	Buleleng	167.2	TINGGI	PKW
84	BANTEN	Tangerang	200.8	TINGGI	PKN Jabodetabekjur
85	BANTEN	Cilegon	182.4	TINGGI	PKN
86	DI YOGYAKARTA	Kota Yogyakarta	124.8	SEDANG	PKN
87	DI YOGYAKARTA	Sieman	153.6	TINGGI	PKW
88	DKI JAKARTA	DKI Jakarta	123.3	SEDANG	PKN Jabodetabekjur
89	JAWA BARAT	Kota Bogor	107.2	SEDANG	PKN Jabodetabekjur
90	JAWA BARAT	Kota Depok	102.4	SEDANG	PKN Jabodetabekjur
91	JAWA BARAT	Bekasi	164.8	TINGGI	PKN Jabodetabekjur
92	JAWA BARAT	Cianjur	250	TINGGI	PKN Jabodetabekjur
93	JAWA BARAT	Kota Bandung	154	TINGGI	PKN Bandung Raya
94	JAWA BARAT	Bandung Barat	162	TINGGI	PKN Bandung Raya
95	JAWA BARAT	Cirebon	181.2	TINGGI	PKN
96	JAWA BARAT	Sukabumi	231.2	TINGGI	PKW
97	JAWA BARAT	Tasikmalaya	224.8	TINGGI	PKW

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota Prioritas	Indeks Risiko	Tingkat Risiko	Struktur Ruang
98	JAWA BARAT	Ciamis	215.2	TINGGI	PKW
99	JAWA BARAT	Pangandaran	215.2	TINGGI	PKW
100	JAWA TENGAH	Kota Semarang	183.6	TINGGI	PKN Kedungsepur
101	JAWA TENGAH	Kendal	167.2	TINGGI	PKN Kedungsepur
102	JAWA TENGAH	Demak	183.6	TINGGI	PKN Kedungsepur
103	JAWA TENGAH	Cilacap	215.2	TINGGI	PKN
104	JAWA TENGAH	Kebumen	203.2	TINGGI	PKW
105	JAWA TENGAH	Magelang	143.2	SEDANG	PKW
106	JAWA TIMUR	Malang	219.2	TINGGI	PKN
107	JAWA TIMUR	Gresik	175.2	TINGGI	PKN Gerbangkertosusila
108	JAWA TIMUR	Bangkalan	164.4	TINGGI	PKN Gerbangkertosusila
109	JAWA TIMUR	Kota Surabaya	166.8	TINGGI	PKN Gerbangkertosusila
110	JAWA TIMUR	Sidoarjo	149.6	TINGGI	PKN Gerbangkertosusila
111	JAWA TIMUR	Lamongan	174	TINGGI	PKN Gerbangkertosusila
112	JAWA TIMUR	Bojonegoro	150	TINGGI	PKW
113	JAWA TIMUR	Pacitan	215.2	TINGGI	PKW
114	JAWA TIMUR	Banyuwangi	219.2	TINGGI	PKW
115	JAWA TIMUR	Jember	219.2	TINGGI	PKW
116	ACEH	Kota Lhokseumawe	175.2	TINGGI	PKN
117	ACEH	Kota Banda Aceh	167.2	TINGGI	PKN, Pusat Pertumbuhan Lainnya
118	BENGGKULU	Kota Bengkulu	170.4	TINGGI	PKW
119	BENGGKULU	Mukomuko	191.2	TINGGI	PKW
120	BENGGKULU	Rejang Lebong	146	TINGGI	PKW
121	JAMBI	Kota Jambi	128	SEDANG	PKN
122	JAMBI	Sarolangun	155.2	TINGGI	PKW

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota Prioritas	Indeks Risiko	Tingkat Risiko	Struktur Ruang
123	JAMBI	Kerinci	150	TINGGI	PKW
124	LAMPUNG	Kota Bandar Lampung	182	TINGGI	PKN
125	LAMPUNG	Lampung Barat	214	TINGGI	PKW
126	LAMPUNG	Tanggamus	201.2	TINGGI	KI Tanggamus
127	SUMATERA BARAT	Kota Padang	209.2	TINGGI	PKN
128	SUMATERA BARAT	Padang Pariaman	196.8	TINGGI	PKW
129	SUMATERA BARAT	Kepulauan Mentawai	197.2	TINGGI	PKW
130	SUMATERA SELATAN	Banyuasin	156.4	TINGGI	KSN (Usulan) Perkotaan Palembang Raya
131	SUMATERA SELATAN	Lahat	162	TINGGI	PKW
132	SUMATERA UTARA	Kota Medan	155.2	TINGGI	KSN Perkotaan Mebidangro
133	SUMATERA UTARA	Langkat	155.2	TINGGI	KSN Perkotaan Mebidangro
134	SUMATERA UTARA	Deli Serdang	155.2	TINGGI	KSN Perkotaan Mebidangro
135	SUMATERA UTARA	Karo	154	TINGGI	KSN Perkotaan Mebidangro
136	SUMATERA UTARA	Simalungun	95.2	SEDANG	KI Sei Mangke

MENGAPA PENINGKATAN KAPASITAS ?



Risiko bencana dirumuskan dengan 3 parameter yaitu ancaman (H), kerentanan (V) dan kapasitas (C), dimana risiko bencana akan semakin tinggi bila ancaman dan kerentanan tinggi, serta kapasitas rendah.

Untuk menurunkan ancaman tidak mudah karena ancaman geologi, perubahan iklim, degradasi lingkungan tidak mungkin kita kurangi. (BOBOT 40%)

Demikian juga mengurangi kerentanan seperti demografi, kemiskinan juga tidak mudah dilakukan. (BOBOT 30%)

Maka peningkatan kapasitas menjadi satu hal yang mungkin dilakukan. Inovasi dilakukan dengan menyiapkan indikator peningkatan kapasitas penanggulangan bencana oleh multi stakeholder. (BOBOT 30%)

MENGAPA 71 INDIKATOR ?

SISTEM PB :
Kegiatan generik

- Kebijakan
- Kelembagaan
- Perencanaan
- Pendanaan
- Peningkatan Kapasitas

**MANAJEMEN RISIKO
BENCANA**
Kegiatan spesifik

- Pencegahan
- Mitigasi
- Kesiapsiagaan
- Tanggap darurat
- Pemulihan

71 INDIKATOR

- 3 STRATEGI RPJMN 2015-2019
- Indikator yang SMART dan disepakati
- Melibatkan multi stakeholder (pemerintah-masyarakat-dunia usaha) dan multi level (nasional-provinsi-kabupaten/kota-komunitas)
- Sesuaikan dengan risiko bencana dan karakteristik ancaman serta kapasitasnya.



5 M

SAVE MORE LIVE

Per-Tahun

Tahun 2030

IP-O-O-BI

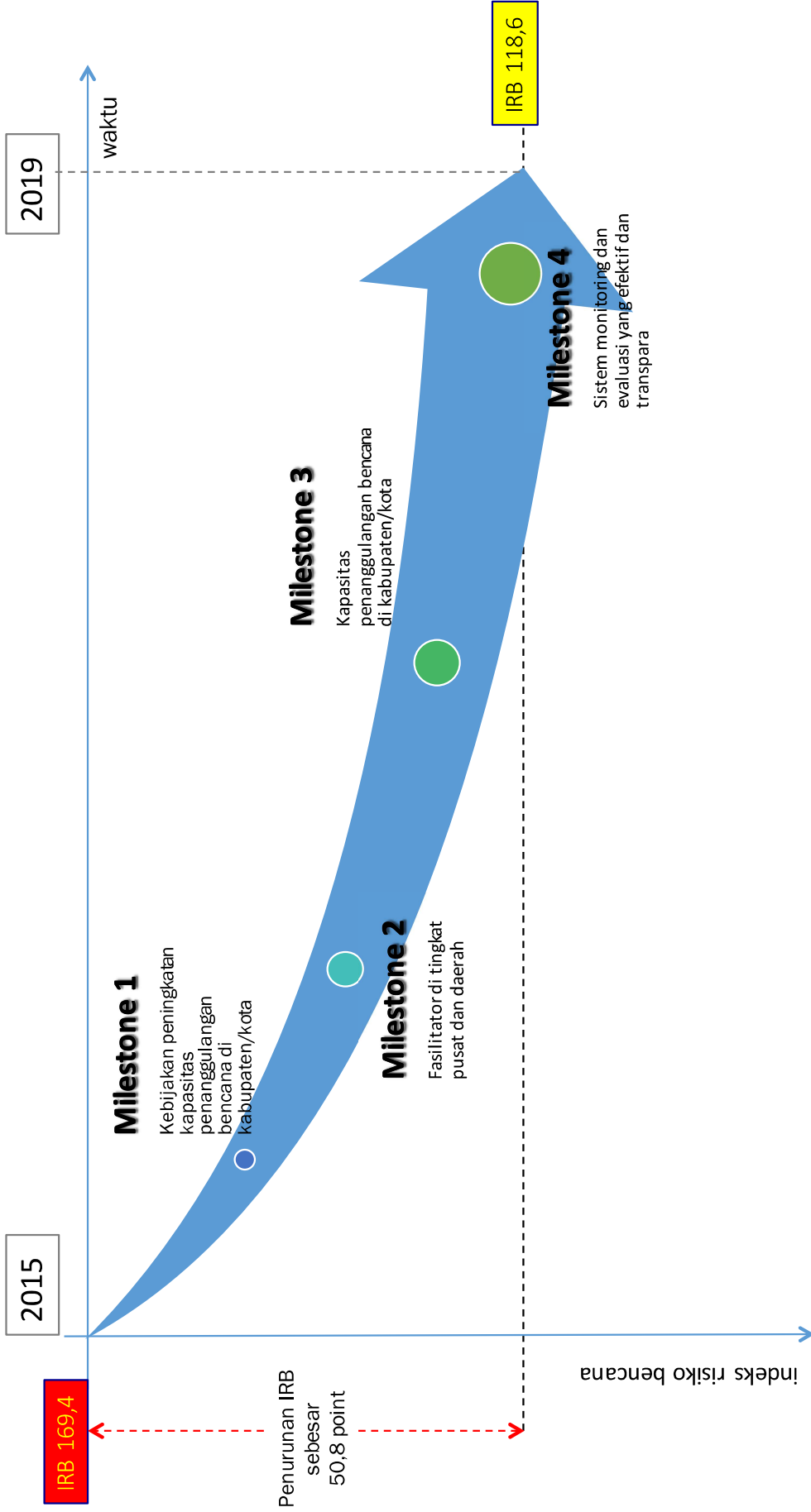
**KEBIJAKAN
FASILITATOR
IMPLEMENTASI
MONEV**

71 INDIKATOR
Sistem PB dan
Manajemen Risiko Bencana
**KABUPATEN/KOTA TANGGUH
BENCANA**

**KUALITAS HIDUP
MASYARAKAT**

**7 TARGET
SFDRR**

- Mengurangi kematian akibat bencana secara global
- Mengurangi jumlah penduduk terpapar bencana secara global
- Mengurangi kerugian ekonomi akibat langsung dari bencana
- Mengurangi kerusakan terhadap infrastruktur penting dan gangguan layanan dasar.
- Meningkatkan jumlah negara yang memiliki strategi nasional dan lokal penurunan risiko bencana
- Meningkatkan kerjasama internasional bagi negara berkembang melalui dukungan terhadap rencana aksi dalam implementasikan kerangka kerja ini
- Meningkatkan ketersediaan dan akses terhadap peringatan dini multi bencana dan informasi risiko bencana serta penilaian untuk masyarakat



INDIKATOR DI DAERAH (IRB)		KETERLIBATAN		
		UTAMA	PENDAMPING	UNIT BNPB
1	Terbentuknya Komitmen DPRD terhadap penganggaran kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana	BNPB	BAPPENAS	SESTAMA
2	Tersedianya Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana yang terintegrasi dengan RPJMD	KEMENDAGRI	BNPB, BAPPENAS	SESTAMA D1
3	Tersedianya Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan	BMKG, KEMEN PU-PERA, KEMEN ESDM, BIG, KEMENTAN	BNPB, BPPT, LAPAN, KEMENKES, KEMENSOS, KLHK, KEMENDES PDDT	D1
4	Tersedianya Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah	BNPB	BMKG, KEMEN PU-PERA, KEMEN ESDM, BIG, KEMENTAN, BPPT, LAPAN, KEMENKES, KEMENSOS, KLHK, KEMENDES PDDT	D1
5	Tersedianya Peta Kapasitas dan kajiannya	BNPB		D1
6	Tersusun dan diimplementasikannya Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	BNPB	BAPPENAS	D1
7	Tersedianya Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB	KEMENDAGRI	KEMEN ATR	
8	Diterapkannya penataan ruang berbasis PRB	KEMEN ATR	BAPPENAS, BNPB, KEMENDAGRI	
9	Tersedianya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PB	KEMENDAGRI	BNPB	SESTAMA
10	Tersedianya Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD	KEMENDAGRI	BNPB	SESTAMA
11	Tersedianya Peraturan tentang pembentukan Forum PRB	KEMENDAGRI	BNPB	SESTAMA D1
12	Tersedia dan diterapkannya sistem pendataan bencana daerah yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional	BNPB	KEMENDAGRI, BMKG, KEMEN PU-PERA, KEMEN ESDM, BIG, KEMENTAN, BPPT, LAPAN, KEMENKES, KEMENSOS, KLHK, KEMENDES PDDT	PUSDATINMAS
13	Tersedianya aturan tentang Penentuan Status Tanggap Darurat	BNPB		D2 SESTAMA

INDIKATOR DI DAERAH (IRB)		KETERLIBATAN		
		UTAMA	PENDAMPING	UNIT BNPB
14	Diterapkannya sistem komando operasi darurat yang mampu memenuhi kebutuhan pengambilalihan komando oleh struktur pemerintahan yang lebih tinggi	BNPB	TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES, KEMEN PU-PERA, KEMEN ESDM, KLHK, BMKG	D2
15	Tersedianya aturan dan diterapkannya mekanisme Penghentian status Tanggap Darurat	BNPB		D2 SESTAMA
16	Tersedianya Rencana Kontijensi Gempabumi	BNPB	TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES, KEMEN PU-PERA	D1
17	Tersedianya Rencana Kontijensi Tsunami	BNPB	TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES, KKP, KEMENPU-PERA	D1
18	Tersedianya Rencana kontijensi banjir	BNPB	TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES, KEMEN PU-PERA	D1
19	Tersedianya Rencana kontijensi tanah longsor	BNPB	TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES, KEMEN PU-PERA, KEMEN ESDM	D1
20	Tersedianya Rencana Kontijensi karlahut	BNPB	TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES, KLHK	D1
21	Tersedianya Rencana kontijensi erupsi gunungapi	BNPB	TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES, KEMEN PU-PERA, KEMEN ESDM	D1
22	Tersedianya Rencana kontijensi kekeringan	BNPB	TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES, KEMEN PU-PERA, KEMEN ESDM	D1
23	Tersedianya Rencana kontijensi banjir bandang	BNPB	TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES, KEMEN PU-PERA, KEMEN ESDM, KLHK	D1
24	Terselenggaranya komunikasi bencana lintas lembaga sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan, minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat mau pun dunia usaha	KEMENDAGRI	BNPB	PUSDATINMAS
25	Terselenggaranya Sekolah dan Madrasah Aman Bencana (SMAB)	KEMENDIKDASBUD, KEMENAG	BNPB	D1

INDIKATOR DI DAERAH (IRB)		KETERLIBATAN		
		UTAMA	PENDAMPING	UNIT BNPB
26	Terselenggaranya Rumah Sakit dan Puskemas Aman Bencana	KEMENKES	BNPB	D1
27	Terselenggaranya sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana melalui media yang tersedia	BNPB	BMKG, KEMEN PU-PERA, KEMEN ESDM, BIG, KEMENTAN, BPPT, LAPAN, KEMENKES, KEMENSOS, KLHK, KEMENDES PDDT	PUSDATINMAS D1
28	Tersedianya Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan di daerah	KEMENDAGRI	KOMINFO, BNPB	SESTAMA PUSDATINMAS
29	Terbangunnya sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat	KEMENKOMINFO	BNPB, BMKG, LAPAN, BPPT	PUSDATINMAS
30	Tersedianya Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik	KEMEN ATR	BAPPENAS, BNPB, KEMENDAGRI	PUSDATINMAS
31	Dibentuknya Forum PRB	BNPB	KEMENDAGRI	D1
32	Dikerahkannya bantuan darurat pada masyarakat terdampak bencana	BNPB	TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES	D2
33	Terselenggaranya pemulihan penghidupan masyarakat	BNPB	TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES, KEMENKEU	D3
34	Terselenggaranya Perbaikan rumah penduduk pasca bencana	KEMEN PU-PERA	BNPB	D3
35	Terselenggaranya Perlindungan daerah tangkapan air pada daerah berisiko banjir, longsor dan kekeringan	KLHK	KEMEN PU-PERA, BNPB	D1
36	Terselenggaranya restorasi sungai pada daerah berisiko banjir dan kekeringan	KEMEN PU-PERA	KLHK, BNPB	D1
37	Terselenggaranya Penguatan lereng pada daerah berisiko longsor dan banjir bandang	KEMEN PU-PERA	KLHK, BNPB, KEMEN ESDM	D1
38	tercapainya optimalisasi pemanfaatan air permukaan untuk pengurangan risiko bencana banjir dan kekeringan	KEMEN PU-PERA	KEMENTAN, KLHK, BNPB	D1
39	Terselenggaranya Pemantauan berkala hulu sungai pada daerah berisiko banjir bandang	KEMEN PU-PERA	KEMENTAN, KLHK, BNPB	D1
40	Diterapkannya penegakan hukum untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan	POLRI	KLHK, BNPB, TNI	SESTAMA

INDIKATOR DI DAERAH (IRB)		KETERLIBATAN		
		UTAMA	PENDAMPING	UNIT BNPB
41	Diselenggarakannya pelatihan dan sertifikasi terkait kemampuan pengelolaan dan operasional kepada aparat PB	BNPB	KEMENDAGRI	PUSDIKLAT
42	Terbentuknya BPBD dengan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas yang baik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	KEMENDAGRI	BNPB	IRTAMA
43	Terselenggaranya Sistem Peringatan Dini Tsunami pada daerah berisiko	BMKG	BNPB, KEMENDIKTIRISTEK	D1
44	Terselenggaranya Sistem Peringatan Dini Banjir pada daerah berisiko	KEMEN PU-PERA	BNPB	D1
45	Terselenggaranya Sistem Peringatan Dini Tanah Longsor pada daerah berisiko	KEMEN ESDM	BNPB	D1
46	Terselenggaranya Sistem Peringatan Dini Kebakaran Hutan dan Lahan pada daerah berisiko	KLHK	BNPB, BMKG, LAPAN	D1
47	Terselenggaranya Sistem Peringatan Dini Erupsi Gunungapi pada daerah berisiko	KEMEN ESDM	BNPB	D1
48	Terselenggaranya Sistem Peringatan Dini Kekeringan pada daerah berisiko	KEMANTAN, KEMEN PU-PERA	BNPB	D1
49	Terselenggaranya Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang pada daerah berisiko	KEMEN PU-PERA	LAPAN, BMKG, BNPB	D1
50	Tersedianya Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis	BNPB	KEMENDAGRI, BMKG, KEMEN PU-PERA, KEMEN ESDM, KEMANTAN, LAPAN, KEMENKES, KEMENSOS, KLHK, KEMENDES PDDT	PUSDATINMAS
51	Diterapkannya pembangunan sumur resapan dan/atau biopori pada kawasan domestik dan komersil	KEMEN PU-PERA	KLHK, BNPB	D1
52	Diterapkannya bangunan aman Gempabumi pada daerah domestik dan komersil	KEMEN PU-PERA	BMKG, BNPB	D1 D3
53	Tersedianya tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami	KEMEN PU-PERA, KKP	KLHK, BNPB	D1

INDIKATOR DI DAERAH (IRB)		KETERLIBATAN		
		UTAMA	PENDAMPING	UNIT BNPB
54	Terselenggaranya revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota	KEMEN PU-PERA	KLHK, BNPB	D1
55	Terselenggaranya restorasi lahan gambut	BRG	KEMANTAN, KLHK, BNPB	D1
56	Terselenggaranya konservasi vegetatif DAS rawan longsor	KLHK	KEMEN PU-PERA, BNPB	D1
57	Dilaksanakannya Penyelenggaraan Latihan (geladi) Kesiapsiagaan secara periodik	BNPB	TNI, POLRI, BMKG, KEMEN PU-PERA, KEMEN ESDM, KEMANTAN, KEMENKES, KEMENSOS	PUSDIKLAT
58	Tersedianya Rencana Evakuasi Bencana Tsunami beserta fasilitas yang dibutuhkan	BNPB	BMKG, KKP	D1
59	Tersedianya Rencana evakuasi bencana erupsi gunungapi beserta fasilitas yang dibutuhkan	KEMEN PU-PERA	BNPB, KEMEN ESDM	D1
60	Terselenggaranya Perbaikan Darurat pada fasilitas publik saat tanggap darurat bencana	KEMENPU-PERA	BNPB, TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES	D2
61	Terselenggaranya pemulihan pelayanan dasar pemerintah pada saat tanggap darurat bencana	KEMENDAGRI	BNPB, KEMENPU-PERA, KEMENKES	D3
62	Terselenggaranya pemulihan infrastruktur penting pada saat tanggap darurat bencana	KEMEN PU-PERA	BNPB	D3
63	Terselenggaranya pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana sebagai respon awal laporan kejadian bencana	BNPB	TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES, KEMEN PU-PERA, KEMEN ESDM, KLHK, BMKG	D2
64	Terselenggaranya pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban sebagai respon awal laporan kejadian bencana	BNPB	BASARNAS, TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES	D2
65	Terbangunnya Desa Tangguh Bencana	BNPB	KEMENDAGRI, KEMENSOS, KKP, KEMENDES PDTT, KEMENKES, KEMEN-KOMINFO	D1
66	Tersedianya kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah	BNPB	TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES	D4
67	Terselenggaranya Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	BNPB	TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES	D4

INDIKATOR DI DAERAH (IRB)		KETERLIBATAN		
		UTAMA	PENDAMPING	UNIT BNPB
68	Tersedianya mekanisme dan fasilitas Penyimpanan/pergudangan Logistik PB	BNPB	TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES	D4
69	Terselenggaranya pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik	BNPB	TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES	D4
70	Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat	KEMEN ESDM	BNPB, TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES	D4
71	Terbangunnya kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat	KEMANTAN	BNPB, TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES	D2

MEMBANGUN DATABASE KEBENCANAAN

DIBI

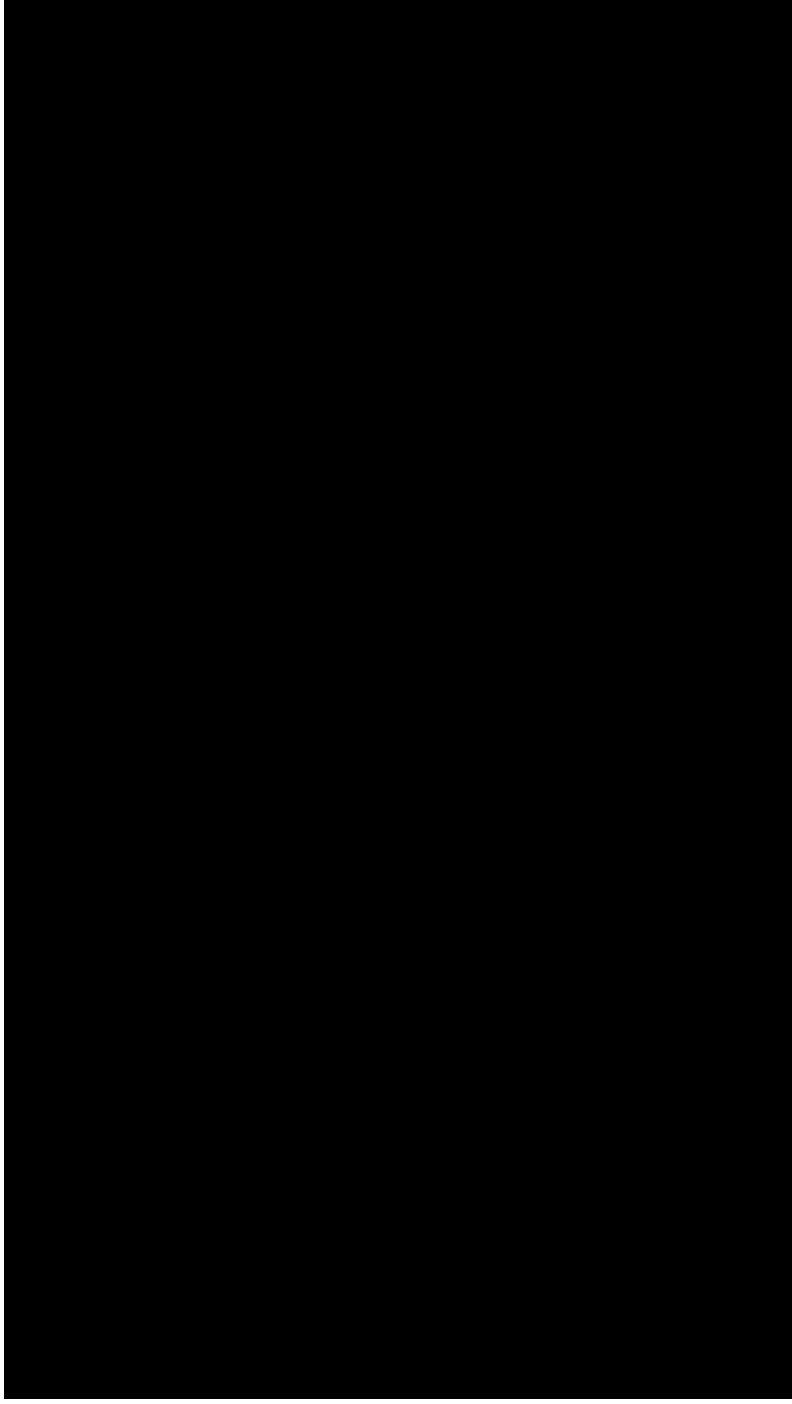
Data dan Informasi Bencana
Indonesia
dibi.bnpb.go.id

SIDIK

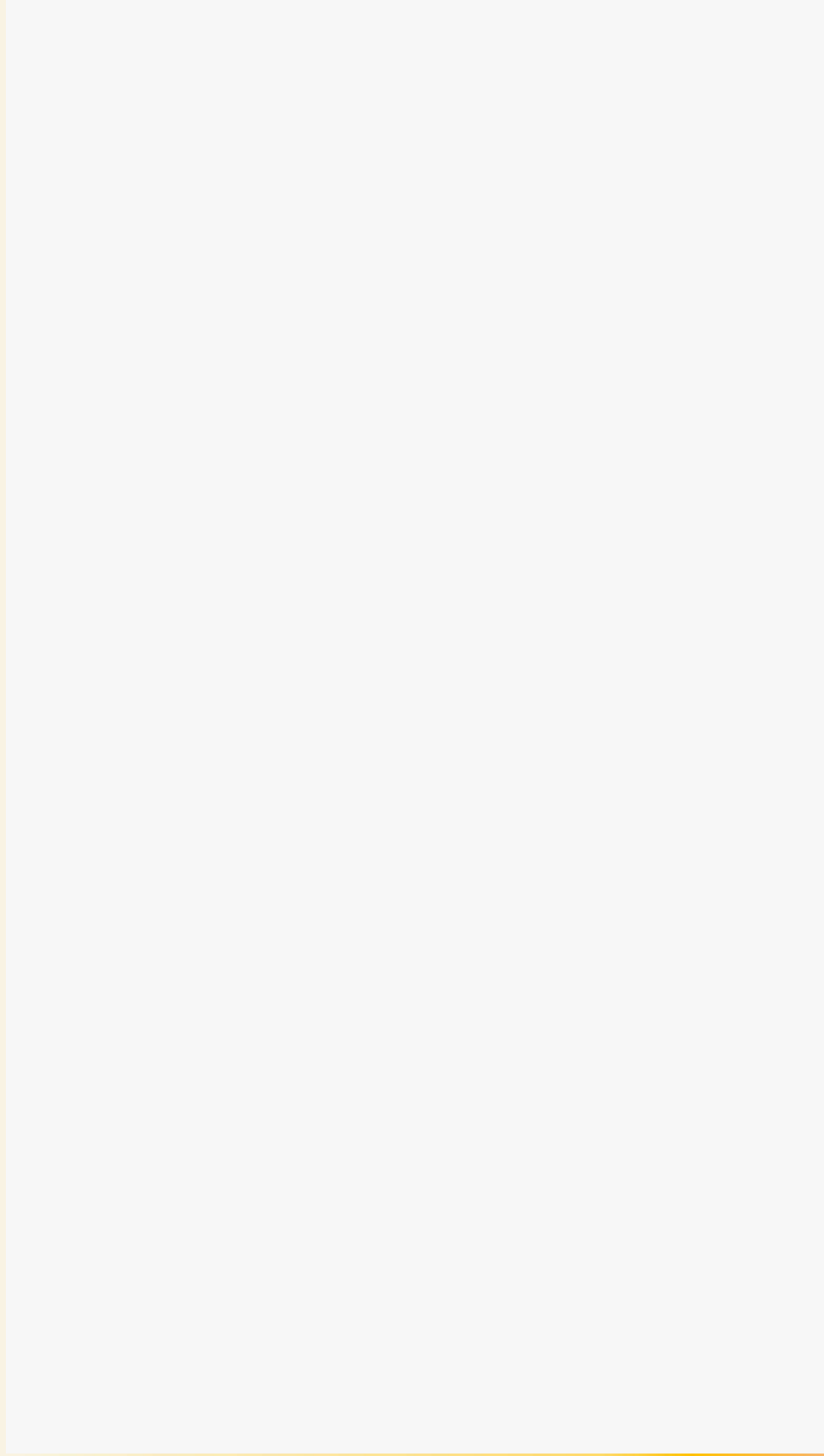
Sistem Informasi Data
Indeks Kerentanan
Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

inaRISK
how risky is your place?

inarisk.bnpb.go.id



tutorial **inaRISK** how risky is your place?



MEMBANGUN KAB/KOTA TANGGUH BENCANA

PENINGKATAN KAPASITAS
PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN/KOTA



PENINGKATAN KAPASITAS
PENANGGULANGAN BENCANA
MASYARAKAT



SISTEM
PENANGGULANGAN BENCANA



BNPB
BERUSAHA SAKSIS INDEKS RISIKO
BENCANA DAERAH ANDIKSI
BERSAMA SAMA MELAKUKAN
PENANGGULANGAN BENCANA

- Meningkatkan ketahanan dan meningkatkan tingkat kesiapsiagaan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.

71 indikator kapasitas daerah
[JAKSTRA PB 2015-2019]



KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN

Memperkuat kebijakan dan kelembagaan yang efektif untuk membangun ketangguhan di daerah

- Peris Perencanaan Bencana
- Peris Badan Penyelenggara Bencana Daerah
- Peris Forum Penyelenggara Risiko Bencana
- Aliran pengetahuan informasi kebencanaan
- Peris Rencana Penyelenggaraan Bencana
- Peris Tata Ruang berbasis Penyelenggaraan Risiko Bencana



KAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN

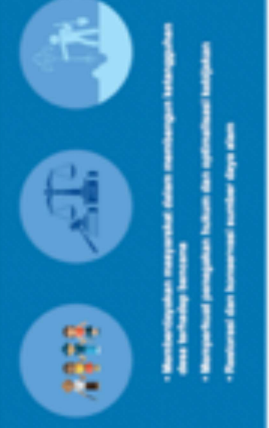
Membangun proses perencanaan yang terpadu mempertimbangkan kajian risiko bencana



- Kultur risiko bencana dan perubahan perilaku untuk perencanaan dan pengurangan kerugian
- Rencana penyelenggaraan bencana berbasis kajian risiko yang diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah

PENCEGAHAN DAN MITIGASI

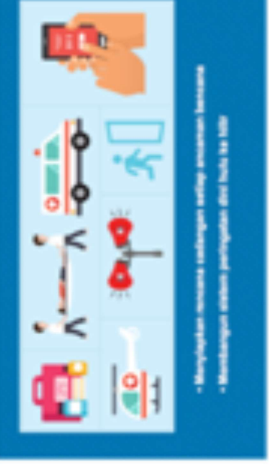
Meningkatkan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana



- Membangkitkan masyarakat dalam membangun ketangguhan dan ketahanan bencana
- Memperkuat pengurangan korban dan upaya pemulihan
- Penalaran dan konvensi standar daya dan

KESIAPSIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT

Memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana



- Menyajikan rencana selangkah selangkah untuk penanganan bencana
- Membangun sistem peringatan dini lebih lanjut

SISTEM INFORMASI

Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi dan efektif



- Sistem informasi yang membangun kemitraan
- Penangan pengetahuan yang mampu menyajikan informasi secara efektif
- Sistem informasi yang terintegrasi antar tingkat pemerintah dari nasional sampai lokal

LOGISTIK DAN PERALATAN

Mencukupi kualitas dan kuantitas logistik daerah dalam mengantisipasi bencana



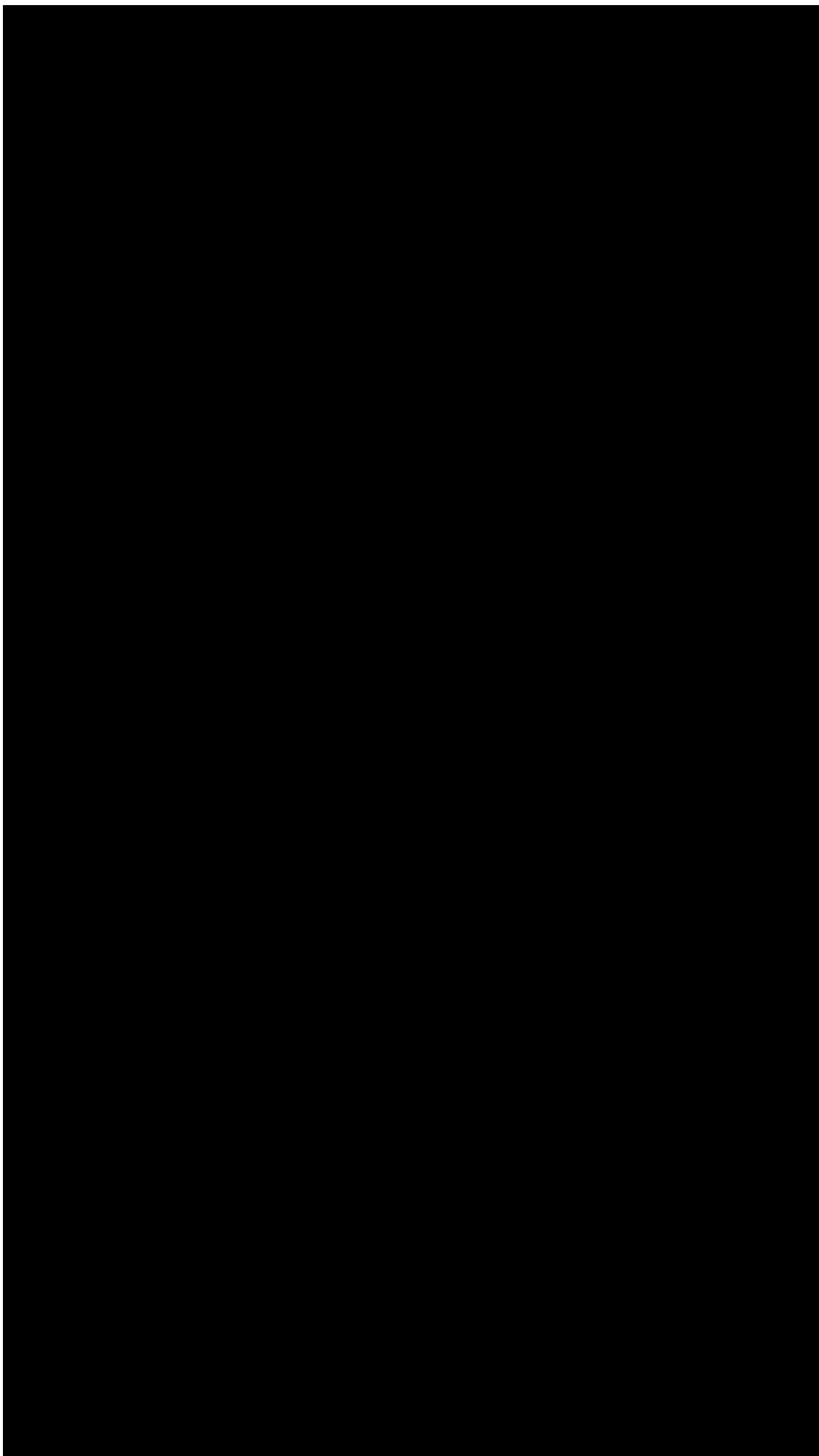
- Memastikan kebutuhan logistik daerah untuk setiap ancaman bencana
- Mengalokasikan logistik dengan efektif dan efisien
- Penemuan kebutuhan penunjang logistik di masa darurat

SISTEM PEMULIHAN BENCANA

Mengembangkan sistem pemulihan bencana



- Infrastruktur penting
- Pemukiman / rumah penduduk
- Penghidupan masyarakat



TERIMA KASIH



BNPB

Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Jl. Pramuka Kav.38 Jakarta Timur 13120

: 021-3458400

: 021-3458500

: contact@bnpb.go.id

: www.bnpb.go.id

: www.facebook.com/bnpb.indonesia

: [@BNPB_Indonesia](https://twitter.com/BNPB_Indonesia)

: [BNPBIndonesia](https://www.youtube.com/BNPBIndonesia)

